

JEJAK SAKURA DI NUSANTARA: PASANG SURUT HUBUNGAN JEPANG- INDONESIA TAHUN 1880an–1974

Aditia Muara Padiatra

E-mail : aditiamuara@gmail.com

Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

ABSTRACT

As a sovereign Country, Indonesia and Japan have a long history of relations. The relationship itself is runs dynamically and based on a variety of factors, which are then interesting to study further. This cannot be avoided, because dynamics relations between Japan and Indonesia are important stories that shaping the nation history. Starting from the concept of south expansion and ends because of foreign investment, this relationship had experienced up and down from time to time. It is interesting to be able to see how the journey of the dynamics of the relationship occurs and what factors are behind it. All of this will be written through a historical perspective in order to create a common thread from the series of events that have occurred.

Key words: *History, Japan in Indonesia, Interaction and Relationship*

PENGANTAR

Merunut dari berbagai sumber yang ditemukan, dinamika hubungan antara Indonesia dan Jepang diawali pada abad ke-19 ketika VOC membuka pangkalannya di Pulau Deshima untuk misi perdagangan (Saya Shiraishi dan Takashi Shiraishi, 1998: 3-5) yaitu ketika pegawai-pegawai VOC (dalam hal ini orang Jepang dan *Geisha*) yang terbawa ke Hindia Belanda dan tidak bisa kembali ke Jepang, menetap di Hindia Belanda. Kala itu *Karayuki-san*, atau yang disebut juga sebagai *Joshigun* masuk ke Indonesia pada tahun 1880-an di daerah Medan, Palembang, Jakarta (Batavia kala itu), dan Surabaya. Gelombang kedatangan ini kemudian berlanjut dengan datangnya orang Jepang yang biasanya berasal dari kalangan tidak berada dan tidak tersentuh kemajuan industri, seperti buruh tani dan kalangan masyarakat bawah, mereka datang ke nusantara biasanya untuk mengadu nasib dengan menjadi pedagang guna mendapatkan penghidupan yang lebih baik (Astuti, 2008: 33).

Apabila menilik lebih lanjut, fenomena ini sendiri merupakan eksek dari Restorasi Meiji pada tahun 1868 yang memberikan kebebasan kepada orang Jepang pada saat itu untuk melakukan perjalanan keluar negeri, setelah sebelumnya Jepang pada masa pemerintahan Tokugawa melakukan kebijakan isolasi, sehingga praktis tidak ada orang Jepang yang bepergian jauh sebelum pertengahan abad ke-19. Di sisi lain, mereka yang biasanya melakukan perjalanan jauh keluar negeri utamanya ke wilayah nusantara biasanya terinspirasi untuk datang dikarenakan mendengar cerita-cerita berhasil para pemuda yang mengembara ke laut selatan (*Nan'yo*) dalam majalah ataupun lagu-lagu (Saya Shiraishi dan Takashi Shiraishi, 1998: 7-10). Mereka inilah yang pada nantinya akan membentuk komunitas Jepang pertama di Indonesia/Asia Tenggara. Mereka disebut dengan *Kimin* yaitu orang Jepang yang tidak diurus oleh negara/ditelantarkan, yang datang ke Hindia Belanda dengan cara diselundupkan, tanpa paspor, dan datang ke sini untuk mencari pekerjaan karena keadaan ekonomi mereka di dalam negeri sangat berkekurangan sebagai dampak industrialisasi dan modernisasi yang dilakukan pada masa Meiji (Saya Shiraishi dan Takashi Shiraishi, 1998: 10-11).

Kala itu pekerjaan yang mereka geluti di Hindia Belanda mayoritas adalah prostitusi (wanita) dan jasa dan perdagangan (pria). Pun menurut sumber yang ada, mayoritas orang Jepang yang datang di Hindia Belanda kebanyakan adalah wanita yang bekerja di dunia prostitusi (baik di perkotaan maupun di daerah-daerah perkebunan) sebagai efek liberalisme yang melanda Hindia Belanda pada saat itu. Sementara para pekerja laki-laki Jepang sangat tergantung pada kaum wanita, dimana mereka banyak yang bekerja di dunia perdagangan atau jasa (memiliki atau mengurus rumah hiburan; penarik becak; tukang cuci; tukang cukur; tukang foto; tukang pijat; penjual tekstil; pemilik warung atau restoran; dokter umum; penjual perhiasan dari kerang, dan lain sebagainya), ada juga yang bekerja dan berinteraksi langsung dengan orang-orang pribumi, seperti pedagang obat-obatan (penjaja keliling), penjudi keliling/tukang taruhan-tembak senjata, sumpit, gasing, gelang, dan lain lain, ada juga yang membuka toko bahan makanan, jam tangan dan barang-barang murah atau palsu (Saya Shiraishi dan Takashi Shiraishi, 1998: 13-15).

Untuk menjalankan usaha tersebut, banyak diantara mereka tidak mempunyai modal yang cukup dan terpaksa meminjam kepada para pemodal besar

(seperti wanita penghibur; pemilik rumah hiburan, pedagang besar di kota ataupun majikan-majikan lokal). Semua kondisi ini terjadi karena sebelum 1898, tingkatan sosial orang Jepang di Hindia Belanda masih disetarakan dengan tingkatan sosial orang Timur Asing lainnya/*Vreemde Oosterlingen* (Cina, Arab, dan lain lain), yang memiliki hak dan kewajiban berbeda dengan masyarakat kulit putih/Eropa di Hindia Belanda (ada diskriminasi hukum, sosial, dan yang lain-lain). Oleh karena itu, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak setara, tetapi jika dibandingkan dengan orang-orang pribumi, kehidupan mereka masih jauh lebih baik (Boxer, 1983: 48-49). Akan tetapi, setelah perang Cina-Jepang berakhir (1894-1895) posisi orang Jepang mulai mendapat pengakuan dari masyarakat Eropa di Hindia Belanda, bahkan mereka kemudian disetarakan dengan bangsa Eropa (secara hukum, ekonomi, dan sosial), hal ini kemudian semakin bertambah lagi setelah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 (Saya Shiraishi dan Takashi Shiraishi, 1998: 20-23).

Hal ini menimbulkan efek yang sangat signifikan kepada bangsa Jepang yang berdiam di koloni Asia Tenggara, apalagi setelah Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan larangan terhadap kegiatan prostitusi secara bertahap (Jawa dahulu, baru kemudian di luar Jawa), maka profesi yang digeluti oleh bangsa Jepang di Hindia Belanda kala itu mulai beralih dari yang sebelumnya pekerjaan 'kotor' (*kokujoku*) kepada pekerjaan yang lebih 'bermoral' guna kepentingan nasional (*koku'eki*). Untuk merubah stigma tersebut, pada awalnya mereka melakukan pendataan serta lisensi kerja bagi para pekerja wanita yang bergelut dibidang prostitusi dan kemudian secara berangsur-angsur melakukan perubahan profesi tersebut dengan menjadi pembantu rumah tangga, pegawai restoran dan lain-lain. Sementara para pekerja laki-laki Jepang kala itu mulai beralih kepada pekerjaan-pekerjaan dengan modal yang lebih besar, seperti pedagang ekspor-impor, pemasok bahan industri mentah bagi negaranya, pengelola perusahaan perkapalan, pergudangan, transportasi laut atau darat, perbankan, dan seterusnya.

Ekspansi Menuju Selatan

Pada pertengahan tahun 1920-an setelah Perang Dunia pertama, industri-industri ini semakin berkembang sejalan dengan kemajuan ekonomi yang diperoleh Jepang. Industri ini terutama adalah perkapalan dan tekstil. Hal ini menimbulkan munculnya para *Zaibatsu* besar (seperti Mitsubishi, Sumitomo, Mitsui) yang menginginkan ruang lingkup yang lebih besar lagi dalam pemasaran. Ditambah lagi dengan negara Jepang sendiri yang sudah penuh sesak dengan pabrik dan industri yang bermunculan, sehingga mereka melakukan tekanan kepada pemerintah untuk dapat melakukan perluasan wilayah secepat-cepatnya.

Hal ini kemudian didukung dan diamini dari beberapa kalangan militer yang berpandangan nasionalistis chauvinis yang berkeinginan untuk melakukan ekspansi terhadap daerah-daerah yang dianggap memberikan sumber daya yang cukup bagi perkembangan ekonomi dan industri di Jepang. Mereka mulai menguasai parlemen dan mengembangkan saham-saham di perusahaan Jepang yang ada pada saat itu (Beasley, 2003: 34-37). Tentunya hal ini kemudian berimbas kepada Indonesia yang tentunya dipandang oleh Jepang memiliki posisi yang strategis serta sumber-sumber

bahan mentah yang melimpah bagi kemajuan industri Jepang. Akhirnya pada tahun 1920-an akhir dan 1930-an, Indonesia menjadi sasaran untuk memasarkan hasil industri yang dipasarkan oleh Jepang. Hal ini kemudian memunculkan toko-toko Jepang di sepanjang wilayah nusantara, dimana para pemilik toko tersebut dikenal dengan sebutan "Tuan Toko". Seiring dengan pesatnya ekspansi pasar yang dilakukan oleh Jepang kala itu, lambat laun toko-toko ini kemudian menjadi terkenal di Hindia Belanda karena selain pelayanan yang ramah serta sopan, harga yang dipasang juga terbilang murah.

Walaupun begitu, berkaitan dengan politik-ekonomi yang dikembangkan oleh Jepang pada masa tersebut, maka biasanya para penjual toko ini juga berprofesi sebagai mata-mata atau "spion" yang bertugas untuk memantau keadaan di wilayah Hindia Belanda. Tidak hanya kegiatan itu saja, kegiatan-kegiatan kampanye pun mulai digalakkan oleh Jepang ke Hindia Belanda sebagai bagian dari propaganda untuk merangkul orang-orang pribumi agar mau membantu Jepang dalam menjalankan politik-ekonomi ekspansionisme tersebut (Ham, 1987: 28-29). Dalam praktiknya, mereka melakukan kegiatan kampanye tersebut melalui media massa yang ada di Hindia Belanda, selain itu mereka juga menyelenggarakan beasiswa yang ditujukan untuk para pelajar di Indonesia agar belajar ke negeri tersebut. Pada perjalanannya mereka cukup berhasil untuk mengambil hati para pemuda dan tokoh pergerakan pada saat itu yang memang tidak menyukai pemerintah kolonial sebagai penguasa daerah jajahan.

Tidak hanya sampai di situ, mereka juga berkeinginan untuk merangkul golongan Islam yang ada di Indonesia. Hal ini dapat terlihat semenjak pertengahan tahun 1920-an, dimana pada saat itu lembaga-lembaga studi Islam dan majalah yang membahas masalah Islam mulai muncul di negara matahari terbit tersebut. Di sisi lain Jepang kala itu juga memberangkatkan seorang profesor yang merupakan ahli Islam, yakni profesor T. Kanaya ke Hindia Belanda untuk memperkuat ikatan antara orang Islam Jepang dan Indonesia. Kegiatan ini kemudian disusul pula oleh berbagai langkah lain, seperti peresmian masjid pertama di Kobe pada tahun 1935, yang kemudian disusul pembangunannya pada tahun 1938 di Tokyo, dengan bentuk yang lebih megah dan dihadiri oleh wakil-wakil dari luar negeri, seperti pangeran Hussein dari Yaman. Propaganda-propaganda yang dilakukan oleh Jepang kala itu terhadap kalangan Islam di Indonesia berlangsung secara masif dan terstruktur. Kegiatan propaganda ini dilakukan dengan melakukan kampanye-kampanye mengenai persamaan antara agama Islam Shinto, hembusan isu bahwa kaisar Jepang akan melakukan perpindahan agama dan memeluk agama Nabi Muhammad, dan banyak penggambaran akan suatu keadaan dimana akan ada harapan bahwa dunia Islam akan berkuasa yang berpusat pada Jepang, dimana Jepang akan dinisbatkan menjadi kekhalifahan yang akan dipimpin oleh kaisar yang akan menjadi seorang khalifah (Benda, 1985: 134-135).

Analisis kenapa orang-orang Jepang berusaha untuk merangkul Islam sebagai sekutu potensial mereka antara lain karena pertama mereka mempunyai keyakinan agama, yang menjadi suatu senjata moral dan sangat berguna bila dimanfaatkan dengan baik. Kedua, Islam berada di dalam lingkup dukungan masyarakatnya yang luas, dalam artian para pemimpin Islam mempunyai dan mewakili massa pemilih yang luas dan langgeng, serta mempunyai kekuatan tawar-

menawar lebih daripada unsur-unsur lain yang ada pada saat itu. Di sisi lain, Islam juga masih tetap mempunyai akar di tengah kaum tani sebagai basis massa potensial bagi kepentingan Jepang. Bagi Jepang, kebencian rakyat Indonesia, terutama yang berasal dari kalangan Islam dan telah berumur berabad-abad lamanya terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang notabene non Islam dapat menjadi keadaan yang sangat menguntungkan bagi Jepang pada saat itu mencitrakan diri sebagai “pelindung Islam.” (Benda, 1985: 139-140). Hal ini kemudian memunculkan tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk meredam laju dari Jepang yang sedang melakukan ekspansi ini. Hal tersebut terangkum dengan beberapa kesepakatan dagang yang dilakukan oleh delegasi Jepang dan Belanda pada masa sebelum perang dunia II yang mengindikasikan, bahwa Jepang menginginkan lebih untuk menanamkan modalnya secara ekonomi dan pengaruhnya secara politik di Indonesia (Ham, 1987: 124).

Perang Besar dan Pendudukan

Perang dunia II yang didahului oleh penyerangan cepat (*Blitzkrieg*) Jerman ke Polandia dan penyerangan besar-besaran Jepang terhadap pangkalan Amerika di *Pearl Harbor* tak pelak memberikan ekseseif penting dalam sejarah di Indonesia. Karena pada saat itu pula dilakukan ekspansionisme militer Jepang di kantong-kantong se-antero wilayah Asia yang kira-kira mempunyai sumber daya serta bahan mentah yang kaya bagi kemenangan peperangan Jepang, salah satunya wilayah Hindia Belanda. Pada tanggal 9 Maret 1942, Hindia Belanda akhirnya menyerah ditangan Jepang setelah digempur habis-habisan melalui serangan cepat Jepang di seluruh wilayah Asia Tenggara. Penyerahan tersebut dilakukan pemerintah Hindia Belanda kepada Jepang yang diikuti penyerahan tanpa syarat seluruh kekayaan yang ada.

Rakyat Indonesia pada awalnya mengidentikkan ini dengan ramalan Jayabaya yang mengatakan bahwa nanti akan datang sebuah bangsa kerdil yang berwarna kuning yang akan memimpin tanah nusantara hanya seumur jagung, dan kemudian akan muncul ratu adil yang akan membawa bangsa Indonesia menuju kemakmuran. Hal ini membawa dampak positif, yaitu sambutan yang bersahabat dari rakyat Indonesia terhadap balatentara Jepang yang kala itu menjejakkan kaki di nusantara, walaupun itu hanya terjadi pada tahap awal saja.

Kedatangan Jepang tidak dapat dipungkiri mengubah struktur yang ada pada masyarakat di Indonesia, hal ini relatif terasa pada struktur tradisional di tingkat bawah dengan menginstruksikan pembentukan *Tonarigumi* (RT/RW di tingkat masyarakat sipil) untuk memudahkan mobilisasi, sampai kepada diadakannya kerja bakti yang menggerakkan masyarakat sekitar. Pada masa Pendudukan Jepang, sifat-sifat dasar feodal yang menjadi ciri khas masyarakat juga berubah bentuk, dari yang sebelumnya masih memiliki hubungan pemberi-penerima, berubah menjadi wakil-wakil pemerintah pusat dan menjalankan perintah dari atas untuk kepentingan dan keuntungan penguasa. Sehingga, bagi kalangan bawah, terutama dalam hal ini petani situasi yang ada tersebut menjadi amat merugikan dan menyengsarakan bagi mereka. (Nagazumi, 1980).

Banyak terjadi perubahan signifikan setelah Jepang mulai berkuasa secara

singkat antara tahun 1942-1945 tersebut. Banyak dibentuk lembaga-lembaga baru yang berhubungan dengan kepentingan Jepang, begitu pula mulai tumbuh rasa nasionalisme kebangsaan sebab diperbolehkan untuk pertama kali bahasa Indonesia dipergunakan di muka umum. Untuk memuluskan posisi di Indonesia dalam mendapatkan sumber daya baik alam maupun manusia bagi kelangsungan perang, Jepang berusaha bekerja sama dengan para tokoh politik untuk mengambil hati rakyat agar berpartisipasi mendukung Jepang. Soekarno dan Hatta dipanggil dari pengasingan untuk membantu pemerintah pendudukan Jepang. Para tokoh politik diberi kedudukan dalam lembaga kerja sama kebudayaan dan propaganda. Sjahrir yang juga mendapat undangan kerja sama tak datang dengan alasan sakit. Selanjutnya, Sjahrir bergerak di bawah tanah untuk tetap memperjuangkan kemerdekaan.

Dalam bidang kebudayaan didirikan *Seimin Bunka Shidoso*, semacam lembaga kebudayaan untuk memajukan seni dan budaya negeri ini. Kegiatannya meliputi kesusasteraan, seni rupa, teater, dan seni-seni tradisional. Hal yang ingin diraih Jepang adalah simpati masyarakat terhadap pendudukan Jepang. Kesenian dianggap media yang ampuh untuk propaganda baik ke luar (anti Sekutu) dan ke dalam membujuk rakyat sukarela membantu keberadaan Jepang di negeri ini.

Untuk menggalang persatuan sebagai sesama bangsa Asia Timur Raya, Jepang mendirikan lembaga propaganda bernama POETERA (*Poesat Tenaga Rakjat*) yang kepemimpinannya dipercayakan pada Soekarno. Meskipun demikian Jepang tak terlalu berminat pada kehidupan politik dan partai, kesempatan ini digunakan dengan baik oleh para pemimpin nasionalis untuk menyebarkan gagasan Indonesia merdeka melalui rapat umum di berbagai pelosok negeri. Kegiatan demikian itu pun tidak disukai Jepang yang tidak beberapa kemudian segera membentuk berbagai lembaga yang lebih operasional guna menunjang kebutuhan pasukan pendudukan menghadapi perang (*Keibodan, Heiho, PETA/Pembela Tanah Air, Romusha*). Pendidikan juga mempunyai faktor yang penting pada saat itu, walaupun tidak bisa dinafikan kurikulum yang mendominasi adalah pesanan Jepang. Pelaksanaan sistem pendidikan yang diterapkan pemerintah Jepang selama di Indonesia pada umumnya berjalan sesuai dengan program-program mereka dan diterapkan secara tepat sasaran pada objek pendidikan mereka selama di Indonesia. Namun, dapat dikatakan bahwa pendudukan Jepang di Indonesia telah menyebabkan terhentinya 'sementara' sistem pendidikan di tanah air. Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintah Hindia-Belanda ke pemerintah Jepang.

Pada masa peralihan tersebut sekolah-sekolah ditutup untuk waktu yang cukup lama (Newell, 1981: 27). Orangtua-orangtua murid khawatir terhadap kemunculan penguasa baru. Guna menanggulangi hal tersebut, atas perintah penguasa pendudukan sekolah kembali dibuka dan sistem pendidikan pun kembali dilanjutkan. Namun, terdapat perbedaan dalam sistem pendidikan yang baru ini, pendidikan yang semula 'serba' Belanda diganti dengan 'serba' Jepang, dan diajarkan oleh guru-guru Indonesia. Hal ini tidak pelak kemudian memberikan eksese-eksese yang cukup signifikan dalam perjalanan sejarah bangsa ini.

Adapun eksese-eksese tersebut antara lain ialah bahasa Indonesia, yang dimana pada masa kolonial Belanda pemakaiannya begitu terbatas pada saat itu mulai berkembang dengan lebih luas, buku-buku berbahasa asing pun banyak

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia karena penggunaan selain bahasa Indonesia dan Jepang pada saat itu dilarang, hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi pribumi Indonesia kala itu untuk menyebarkan buku pada kalangan lebih luas dan tidak terpusat pada kalangan elit berbahasa Belanda saja. Selain itu, semua sekolah menjadi diseragamkan tanpa memandang stratifikasi sosial tertentu seperti pada masa kolonial Belanda, hal ini tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia kala itu untuk lebih leluasa dalam menempuh pendidikan, terlepas dari batasan ras atau tingkatan sosial tertentu. Selain itu ilmu bela diri menjadi wajib diajarkan hampir di semua institusi pendidikan, yang meninggalkan suatu corak kedisiplinan tersendiri pada saat itu. Terakhir, akses positif yang kemudian didapat dari masuknya Jepang tersebut adalah bangsa Indonesia kemudian dilatih dan dididik untuk memegang jabatan-jabatan penting di dalam pemerintahan, hal yang tidak pernah terjadi pada masa kolonial Belanda, walaupun tidak dapat dipungkiri jabatan tersebut masih berada di bawah pengawasan orang Jepang (Sudibyo, 2009: 50).

Kesemua faktor-faktor ini merupakan bekal penting bagi perjuangan Indonesia pada masa-masa selanjutnya. Namun selain hal-hal positif tersebut, banyak pula hal negatif yang berlangsung pada masa pendudukan Jepang, beberapa bahkan menyebabkan terjadinya pemberontakan. Hal ini sendiri antara lain diakibatkan oleh bentuk pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militeristik, ataupun peraturan yang mengintervensikan golongan tertentu, seperti Islam yang tidak setuju dengan *Seikerei* (kebiasaan membungkuk dihadapan matahari) yang dilakukan oleh Jepang, seperti yang dilakukan oleh K.H. Zainal Mustopha di Singaparna ataupun akibat kekurangan bahan pangan yang pada saat itu begitu menyengsarakan sehingga menyebabkan pemberontakan di Indramayu (Nagazumi, 1980).

Bom nuklir yang meluluhlantakkan kota Hiroshima dan Nagasaki yang merupakan sentral industri Jepang tak pelak akhirnya membuat Jepang menyerah dan kalah dalam pertempuran dunia yang kedua. Para pemuda dan tokoh pergerakan pada saat itupun tidak menyia-nyiaikan kesempatan tersebut, dan memproklamkan kemerdekaan RI pada 17 agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, banyak di antara para mantan prajurit Jepang yang ikut membela kedaulatan NKRI. Alasannya beragam, antara lain karena jatuh cinta kepada tanah pertiwi sampai kepada kekecewaan akibat kekalahan Jepang di Perang Dunia II.

Era Setelah Kemerdekaan

Setelah masa revolusi selesai, maka dimulailah masa demokrasi parlementer yang merupakan masa awal dari perodesasi sejarah Indonesia. Masa Demokrasi Parlementer dimulai semenjak pemerintah kala itu, yang dikomandoi oleh presiden berkuasa Soekarno melakukan pergantian dari bentuk Republik Indonesia Serikat yang sifatnya federal, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia pada bulan Agustus 1950.

Masa itu ditandai oleh situasi politik relatif dinamis yang memungkinkan berbagai ideologi dan kepentingan saling berebut mengisi kemerdekaan yang baru diperoleh. Hal ini tentu membuat keadaan negara yang baru saja merdeka menjadi

tidak stabil. Melihat adanya sejumlah pertentangan dan dinamika tersebut, presiden Soekarno dan Kolonel Nasution kemudian melakukan inisiatif untuk mengubah keadaan dengan menyatakan Indonesia sedang dalam keadaan darurat (SOB) pada bulan Maret 1957 sehingga demokrasi parlementer yang sempat berjalan kemudian digantikan oleh sistem demokrasi terpimpin di bawah komando langsung Presiden.

Pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno berjasa dalam menegakkan kembali normalisasi hubungan antara Jepang dengan Indonesia dalam tataran bilateral. Hubungan bilateral kedua negara ini sendiri dibuka pada tanggal 20 Januari 1958 dengan adanya penandatanganan kesepakatan perdamaian antara kedua negara. Pada tahun yang sama pula ditandatangani perjanjian mengenai pampasan perang. Sedangkan jalur penerbangan antara Jepang dan Indonesia kemudian dibuka pada tahun 1963. Walaupun merasakan kejamnya pendudukan militer Jepang 1942-1945, sikap Indonesia terhadap Jepang, jauh lebih lunak dibandingkan sikap China dan Korea apabila menyoal tentang sejarah pendudukan militer di kedua negara tersebut.

Ada beberapa hal yang kemudian menjadi penyebab mengapa Indonesia mengambil sikap tersebut. Pertama, sebagai sebuah negara, walaupun dalam tataran tertentu dianggap melakukan aneksasi ke Hindia Belanda (Indonesia) dalam rangka melakukan peperangan pada perang dunia ke-2 melawan sekutu, namun oleh sebagian kalangan juga dianggap sebagai “pembebas” yang mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Kedua, terdapat sejumlah pemuda dan pimpinan militer Indonesia yang kala itu masuk sebagai prajurit PETA (Pembela Tanah Air), *Heiho*, *Kaigun Heiho*, Barisan Pelopor, serta unsur-unsur lainnya yang dilatih oleh Jepang (sebagai bagian daripada unsur pertahanan Jepang guna menangkal serangan sekutu di wilayah nusantara) yang kelak menjadi kekuatan awal bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan oleh Soekarno dan para tokoh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 (Notosusanto, 1991: 40-41), Beberapa faktor ini tak pelak pada akhirnya membuat Jepang oleh sebagian kalangan kala itu dianggap (sedikit banyak) mempunyai jasa terhadap kemerdekaan Indonesia yang telah direngkuh dan pertahankan.

Kedua, faktor yang juga penting untuk dicatat adalah semenjak penegakan hubungan diplomatik pada tahun 1958, hubungan yang terbentuk antara Indonesia dan Jepang menjadi amat erat, beberapa hal yang mendasari hal tersebut utamanya berasal dari sektor ekonomi, seperti Jepang kala itu menjadi penyandang dana terbesar bagi Indonesia dari sektor investasi, begitupula Indonesia yang menjadikan Jepang sebagai pasar penting bagi ekspor sumber daya yang dimiliki. Hubungan timbal-balik ini semakin menguat kemudian pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang kala itu Indonesia berada dalam kelompok antikomunis bersama-sama dengan Jepang yang memandang China, sebagai salah satu kekuatan selain Rusia sebagai suatu ancaman dari luar yang utama.

Faktor-faktor tersebut lah yang kemudian membuat hubungan Indonesia dan Jepang kala itu menjadi semakin erat, ditambah dengan adanya berbagai kesamaan kepentingan, hal ini pada akhirnya membuat kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut menjadi semakin strategis dan dilakukan melalui berbagai macam hal.

Hutang, Modal Asing, dan Reaksi Masyarakat

Menilik kepada konteks sejarah Indonesia sendiri, investasi sempat dianggap bukan merupakan hal yang baik, anggapan ini begitu digaungkan pada masa kepemimpinan Soekarno, dimana investasi asing dipandang sebagai perpanjangan tangan dari imperialisme apabila tidak dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan revolusioner kala itu. Hal ini kemudian secara drastis berubah setelah terjadi pergantian kekuasaan kepada Soeharto yang kala itu melihat investasi asing lebih kepada dana untuk memperkuat industrialisasi dan pembangunan dalam negeri secara pragmatis pasca pergantian rezim (Kunio, 1991: 34).

Pada akhir tahun 1960-an, Indonesia di bawah pemerintahan Soeharto membuka keran terhadap investasi yang dilakukan oleh Jepang, hal ini bukannya tanpa sebab, mengingat kondisi perekonomian yang sedang tidak baik kala itu, pemerintahan di bawah kepemimpinan Soeharto tidak mempunyai banyak pilihan kecuali menawarkan insentif yang royal kepada sejumlah investor asing. Sambil memanfaatkan insentif-insentif ini, sejumlah besar perusahaan manufaktur Jepang menginvestasikan dana mereka di Indonesia.

Hal ini sendiri dilakukan karena anggapan bahwa Indonesia merupakan negara besar, pasar yang potensial untuk sebagian besar produk industri walaupun tingkat pendapatannya masih menjadi salah satu yang rendah di antara lima negara ASEAN, iming-iming ini pada akhirnya cukup untuk memikat sejumlah perusahaan Jepang, yang kendati mulai lebih belakangan dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah terlebih dahulu menginvestasikan dana di Indonesia, seperti Amerika Serikat, namun grafik investasinya terus beranjak dan merangkak naik (Kunio, 1991: 35).

Hubungan ekonomi bilateral antara Jepang dengan Indonesia sendiri dapat ditilik semenjak adanya *Agreement on Amityrelation and Commerce* yang ditandatangani di Tokyo pada tanggal 1 Juli 1961 (Direktorat Jenderal Kerjasama Asean Departemen Luar Negeri RI, 2001). Sebagai realisasi kebijaksanaan tersebut, pada bulan September 1966 diadakanlah pertemuan multilateral pertama di Tokyo atas prakarsa dari Jepang, pertemuan ini kemudian menghasilkan kelompok yang dinamakan dengan *Tokyo Club* yang terdiri dari wakil-wakil dari negara kreditor di luar negara Blok Komunis, yang akan membicarakan masalah ekonomi dan keuangan yang dihadapi serta masalah utang Indonesia kepada negara-negara kreditor. Setelah agenda pertemuan tersebut, pembahasan mengenai masalah ekonomi dan bantuan luar negeri ini kemudian dilanjutkan dengan *Paris Meeting* Desember 1966.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menentukan kriteria pokok, dengan maksud untuk menyelaraskan dengan politik luar negeri yang bebas aktif sesuai GBHN yang antara lain sebagai berikut, pertama ialah bantuan luar negeri tidak boleh dikaitkan dengan ikatan politik. Kedua, ialah syarat pembayaran harus dalam batas-batas kemampuan untuk membayar kembali, dan yang ketiga ialah penggunaan bantuan luar negeri haruslah untuk pembiayaan proyek-proyek yang produktif dan bermanfaat.

Bantuan luar negeri dari Jepang untuk Indonesia kemudian dikenal dengan ODA (*Official Development Assistance*) pertama kali masuk ke sejumlah negara-negara

Asia, khususnya ASEAN, sebagai program pembayaran reparasi perang pasca perang dunia II. Dalam kasus Indonesia, ODA masuk melalui program pembayaran perbaikan pasca perang pada tahun 1958 dengan total sebesar 223 juta Dollar AS. Pada tahun tersebut tipe bantuan yang diberikan berupa bantuan teknis dan hibah. Bantuan selanjutnya terjadi pada tahun 1967, saat terjadinya masa peralihan dari rezim Soekarno ke rezim Soeharto. Kala itu kepemimpinan di bawah Presiden Soeharto mewarisi keadaan ekonomi yang carut marut hasil dari kebijakan Soekarno. dimana inflasi yang ada naik begitu tinggi sehingga harga barang-barang yang ada meroket naik sebesar 500 persen, anggaran yang defisit, serta permasalahan utang luar negeri yang membengkak menjadi tantangan daripada rezim yang baru hadir tersebut (Hakim, 2012), sehingga ODA dianggap sebagai perpanjangan nafas dari pemerintah untuk dapat menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada.

Bantuan lanjutan juga kemudian terjadi pada tahun 1969, ketika pemerintah pada saat itu sedang menerapkan konsep awal dari REPELITA (Rencana Pembangunan Lima tahun), dalam hal ini ODA Jepang menjadi faktor penting bagi terlaksananya rencana tersebut, terutama dalam mengatasi defisit anggaran yang ada. Dalam perjalanannya, Indonesia merupakan salah satu negara terbesar penerima ODA/bantuan keuangan dari Jepang tersebut dengan total pinjaman mencapai 10,8 milyar Yen yang mulai disalurkan sampai dengan 1970 (Raymond, 2009: 34-35).

Ada beberapa faktor yang menarik di sini, mengapa Indonesia dalam hal ini menjadi sasaran gelontoran dana besar-besaran dari pihak Jepang. Salah satu hal yang utama ialah karena posisi Indonesia yang relatif penting dan vital bagi Jepang, terutama dalam kepentingan ekonomi dan politik regional negeri matahari terbit di kawasan asia tenggara. Dalam hal ekonomi misalnya, Indonesia merupakan salah satu penyedia (*supplier*) LNG (*liquid natural gas*) terbesar bagi Jepang. Selain itu pula, Indonesia pernah menjadi salah satu negara pengekspor minyak Jepang (dengan jumlah yang cukup signifikan). Kekayaan yang melimpah akan sumber daya alam, upah tenaga buruh yang relatif murah (walaupun sekarang ini disaingi oleh Vietnam), serta ditambah dengan jumlah penduduk yang padat sebagai sebuah potensi pasar, membuat Indonesia 'menarik' di mata Jepang.

Sedangkan ditilik dari kepentingan politik Jepang atas wilayah Indonesia, utamanya setelah krisis minyak, Indonesia dipandang mempunyai posisi yang amat strategis, hal ini dikarenakan posisi yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Selat Lombok, hal ini dapat dimanfaatkan sebagai jalur perdangangan internasional maupun jalur pengiriman minyak dari Timur-Tengah. Di sisi lain, Indonesia juga dipandang mempunyai peranan penting di wilayah ASEAN. Dalam kacamata Jepang, membangun persahabatan yang erat dengan Indonesia dipercaya menjadi kunci bagi terciptanya stabilitas ekonomi serta politik di kawasan tersebut. Selain itu, Indonesia dianggap sebagai 'pintu-gerbang' ASEAN, sehingga membina hubungan baik dengan Indonesia, berarti pula akan membina hubungan baik dengan kawasan tersebut.

Di antara beberapa contoh dari bagaimana perlakuan istimewa Jepang terhadap Indonesia tersebut terlihat dari angka investasi Jepang di Indonesia antara tahun 1967-1990 dalam sektor non-minyak yang mencapai 7,9 miliar Dollar AS, besaran dana yang bahkan mengalahkan Amerika Serikat yang hanya menggelontorkan dana sebesar 2 miliar Dollar AS, dan Belanda yang hanya menggelontorkan dana sebesar 1,5 miliar Dollar AS. Hal ini kemudian menjadikan Jepang sebagai partner dagang terbesar bagi Indonesia kala itu, baik dari sisi ekspor maupun impor.

Hal ini kemudian berpuncak pada momen ketika dikeluarkan kebijakan penanaman modal asing melalui UU Nomor 02/1968 oleh pemerintahan Soeharto, namun hal ini tidak serta merta membuat hubungan di antara kedua negara menjadi semakin erat, namun

sebaliknya, menjadi pukulan yang membuat hubungan kedua negara tersebut menjadi agak renggang, utamanya dimata masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa modal asing yang digelontorkan oleh Jepang sebagai program bancakan dan korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh segelintir oknum yang mempunyai koneksi yang dekat dengan pemerintah pusat. Protes besar-besaran pun bermunculan, terutama dilakukan oleh para mahasiswa dan masyarakat yang tidak puas dengan adanya kebijakan tersebut dan korupsi yang mendera pemerintahan pada saat itu.

Nahas, kesemua protes-protes tersebut, yang sebelumnya diniatkan untuk berjalan damai, kemudian berujung pada tragedi 15 Januari 1974 atau lebih dikenal sebagai tragedi Malari ([Raillon, 1988: 112](#)). Akibat peristiwa tersebut, sedikitnya 11 orang menjadi kehilangan nyawa, 300 orang luka-luka, 775 orang ditangkap, sekitar 807 mobil dan 187 sepeda motor terbakar, serta 144 bangunan rusak (Arifin, 1974). Tak pelak peristiwa ini sendiri menjadi salah satu bagian dari kisah kelam yang pernah terjadi dalam sejarah tanah air.

KESIMPULAN

Berkisar pada runutan diatas, Jepang mempunyai jejak hubungan yang cukup panjang dengan Indonesia. Mulai ketika masa penjajahan kolonial Belanda berlangsung, sampai dengan masa pasca Kemerdekaan, hubungan yang terjadi antara Jepang dan Indonesia dapat terjalin dengan baik dengan gejolak-gejolak yang menyertainya. Apabila ditilik, hubungan ini sendiri terjalin atas kepentingan-kepentingan strategis, utamanya berkisar pada masalah ekonomi dan politik, baik ketika Indonesia masih berbentuk Hindia Belanda sampai dengan pasca pengakuan kedaulatan. Sebagai sebuah negara yang mempunyai kekayaan alam yang begitu luar biasa, Jepang melihat Indonesia sebagai mitra yang menguntungkan bagi mereka, begitu pula Indonesia yang melihat Jepang sebagai negara maju yang dapat mentransfer teknologi dan keilmuan guna mempercepat kemajuan bagi mereka. Simbiosis mutualisme ini yang kemudian membuat hubungan ini menjadi tetap bertahan walaupun ada beberapa hambatan yang menyertainya, seperti perlakuan Jepang selama masa pendudukan yang begitu membekas di benak masyarakat Indonesia, serta protes-protes anti modal asing yang dilakukan oleh para masyarakat juga merupakan tantangan dalam hubungan kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (1974). Fakta Analisa Lengkap dan Latar Belakang Peristiwa 15 Januari 1974. Jakarta: Publishing House Indonesia.
- Astuti, M. S. P. (2008). Apakah Mereka Mata-Mata? Orang-Orang Jepang di Indonesia (1868-1942). Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Beasley, W. G. (2003). Pengalaman Jepang: Sejarah Singkat Jepang. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Benda, H. J. (1985). Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya dan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Boxer, C. R. (1983). Jan Kompeni: Sejarah dalam Perang dan Damai 1602-1799.

- Jakarta: Sinar Harapan.
- Direktorat Jenderal Kerjasama Asean Departemen Luar Negeri RI. (2001). *Pemulihan Ekonomi Indonesia Melalui Kerjasama Investasi dan Perdagangan dengan Mitra Wicara ASEAN +3 (Cina-Jepang-Korea Selatan): Hambatan dan Peluang*. Jakarta: Departemen Luar Negeri RI.
- Hakim, A. (2012). Perbandingan Perekonomian Dari Masa Soekarno Hingga Susilo Bambang Yudhoyono (1945 - 2009). *Jurnal Ekonomika Bisnis*, 03 (02), 161–180.
- Ham, O. H. (1987). *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kunio, Y. (1991). *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Nagazumi, A. (Ed.). (1980). *Pemberontakan Indonesia di Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Newell, W. H. (1981). *Japan in Asia (1942-1945)*. Singapore: Singapore University Press.
- Notosusanto, N. (1991). *Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Raillon, F. (1988). *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. Jakarta: LP3ES.
- Raymond, R. (2009). *Peran Bantuan Luar Negeri Jepang dalam memperkuat Hubungan Ekonomi Asimetris dengan Indonesia Studi Kasus: ODA (Official Development Assistance) Jepang di Indonesia Pasca Krisis Asia (1999-2008)*. University of Indonesia.
- Saya Shiraishi dan Takashi Shiraishi (Ed.). (1998). *Orang Jepang di Koloni Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sudiby, D. S. (2009). *Kebijakan Jepang dalam Bidang Pendidikan terhadap Orang Indonesia Tahun 1930-1945*. University of Indonesia.